BAB 1

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Lingkungan bisnis kontemporer ditandai oleh ketidakpastian dan resiko sehingga tidak mudah untuk meramalkan dan mengendalikan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan (Kuratko dan Morris, 2003). Pelanggan menjadi lebih menuntut sehingga perusahaan perlu berfokus guna meningkatkan profesionalisme manajemen dan kualitas pelayanan perusahaan (Lai dan Cheng, 2003). Hal ini menjadikan perusahaan menerapkan berbagai strategi guna memperbaiki, mempertahankan posisi kompetitif dan menjaga eksistensi perusahaan.

Mengingat perkembangan bisnis saat ini semakin kompleks, pemegang saham tidak bisa bekerja seorang diri dalam mengelola perusahaan. Diperlukan pemisahan (separation) antara kepemilikan dan pengelolahan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Akibatnya terjadilah hubungan keagenan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Pemegang saham akan mendelegasikan wewenang kepada manajer. Konsekuensinya, manajer memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mengatasnamakan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menambahkan, ketika manajer mengambil keputusan namun tidak mewakili kepentingan pemegang saham, maka akan muncul konflik keagenan. Manajer berupaya memperkaya dirinya sendiri melalui kewenangannya. Implikasinya adalah kekayaan pemegang saham menjadi tidak maksimum. Untuk itu, diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai upaya menekan konflik keagenan (Hasan dan Butt, 2009).

Indonesian *Institute* for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, karyawan dan pemasok. Itulah sebabnya, good corporate governance dipandang sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi pasar yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap perusahaan dan iklim investasi suatu negara. Keberadaan good corporate governance adalah sebagai wujud komitmen menjaga eksistensi dan keberlangsungan perusahaan.

Hasil penelitian Johnson, dkk., (2000) dan Tjager, dkk., (2003) menunjukan bahwa krisis finansial Indonesia pada tahun 1997, yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia, dipandang sebagai akibat dari lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Temuan ini didukung oleh laporan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006). Lemahnya *good corporate governance* ketika krisis ekonomi dan moneter di Indonesia tahun 1997 hingga 1999 terjadi di semua sektor bisnis selanjutnya menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Contohnya, pasca krisis 1997 PT. Kimia Farma, Tbk., terbukti melakukan rekayasa pencatatan laporan keuangan perusahaan tahun 2001 seperti yang dimuat di Tempo (4 November 2002). Rekayasa pencatatan dilakukan dengan melakukan *mark-up* laba bersih perusahaan. Hal ini tentu menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dijadikan pelajaran bahwa perusahaan harus menganut dan menjamin dijalankannya prinsip-prinsip good corporate governance, yakni transparan, akuntanbilitas, responbilitas, independensi dan keadilan. Prinsip ini menjadi komitmen perusahaan untuk menjaga kepercayaan dan kepentingan *stakeholder*. Mengingat perusahaan dengan predikat *good corporate governance* yang rendah akan dihindari oleh investor.

Shleiver dan Vishny (1997) menjelaskan *corporate governance* adalah sebuah mekanisme legal untuk melindungi *minority shareholder* dari ekspropriasi para *insider* dan *majority shareholder* perusahaan. Bai, dkk., (2004) menjabarkan *corporate governance* terdiri dari dua mekanisme, yakni mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal bertujuan untuk mencegah atau mengurangi konflik antar pemegang saham, manajer, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya di bawah kendali manajer dan pemegang saham. Sedangkan mekanisme eksternal dilakukan melalui mekanisme pendisiplinan dan pengawasan di luar perusahaan melalui *market for corporate control*. Diantaranya adalah *managerial labor market, capital market*, dan *market for product* (Fama, 2001; Demsetz, 1983; Stulz, 1988).

Bathula (2008) menilai mekanisme internal menjadi poros penting dalam penerapan good corporate governance. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kendali langsung atas mekanisme internal yang mana memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Mekanisme internal tersebut diantaranya adalah manajemen dan komisaris. Keduanya memiliki peran penting dalam penyusunan, pengimplementasian dan pengawasan berbagai kebijakan strategis perusahaan. Manajemen sebagai eksekutor kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Berbeda dengan komisaris yang memiliki fungsi diantaranya mengawasi kinerja manajemen untuk menekan biaya agensi (Eisenhardt, 1989), memberi saran dan arahan strategis untuk perusahaan (Tricker, 1984), melindungi pemegang saham demi profesionalisme manajemen tercapainya dan akuntabilitas guna meningkatkan kinerja perusahaan (Hillman dan Dalziel, 2003; Hendry dan Kiel, 2004).

Pengaruh manajemen terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat menggunakan kepemilikan manajerial, yakni persentase saham beredar perusahaan yang dimiliki manajemen. Manajer memiliki informasi lebih kredibel dan aktual mengenai kondisi perusahaan. Sedangkan pengaruh komisaris terhadap kinerja perusahaan dapat ditinjau melalui jumlah komisaris, yakni jumlah keseluruhan anggota komisaris. Besar kecilnya jumlah komisaris dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Bathula (2008) melakukan penelitian empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris terhadap kinerja perusahaan. Temuan empirisnya menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu Bathula (2008) juga menguji peran jumlah komisaris dalam hubungan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Hasilnya, keberadaan jumlah komisaris memperkuat hubungan kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan.

Kohansal, dkk., (2015) melakukan pengujian hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Hasilnya diketahui kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh manajer mendukung terjadinya convergent of interest yakni manajer bekerja sesuai kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini dikarenakan manajer akan ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusannya dan ikut menanggung kerugian apabila salah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bhagat dan Bolton (2008), Liu, dkk., (2012), Abor dan Biekpe (2007), Jaffar dan El-Shawa (2009), Kao, dkk., (2013). Hasil empiris sebaliknya ditemukan oleh Sudarma (2003) yang melakukan

penelitian di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukan menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan oleh persentase kepemilikan manajerial di Indonesia relatif rendah, yakni sebesar 2,8%. Di sisi lain struktur kepemilikan saham perusahaan-perusahaan di Indonesia didominasi family business yang menjadi controlling shareholders (Bunkanwanicha, et al. 2008). Sehingga manajer tidak memiliki cukup kekuatan untuk menentukan keputusan strategis perusahaan karena kekuatan manajer dibawah kendali controlling shareholders. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Maryanah dan Amilin (2011), Rehman dan Ali (2013), Juson, dkk., (2013).

Isshaq, dkk., (2009) menjabarkan bahwa semakin besar jumlah komisaris perusahaan, maka akan semakin menstimulus pertukaran informasi dan adanya sinergi antar anggota komisaris. Selain itu, jumlah komisaris yang besar lebih efektif dalam fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan saran dan gagasan kreatif kepada manajemen puncak. Sehingga, jumlah komisaris yang besar dapat mengawasi manajemen lebih ketat. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan. Singkatnya, jumlah komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Coleman, 2007; Kumar, dkk., 2011; McKinght dan Charlie, 2009; Al-Najjar, 2014; Klein, 1998; Abor dan Biekppe, 2007; Jaffar dan El-Shawa, 2009).

Namun hasil penelitian Kohansal, dkk., (2015) menunjukan adanya hubungan negatif antara jumlah komisaris dan kinerja perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris, kinerja perusahaan akan semakin menurun. Hal ini disebabkan adanya konflik antar anggota dewan komisaris yang jumlahnya besar dalam mengambil keputusan. Kelemahan dalam berkomunikasi di dalam kelompok besar membuat fungsi komisaris menjadi tidak efektif.

Akhirnya tidak dapat mengawasi kinerja manajemen (Mashayekhi dan Bazaz, 2008). Hal ini menjadi alasan Jensen (1993) memilih jumlah komisaris kecil karena dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Eisenberg dkk., 1998; Raoof, dkk., 2010; Kao, dkk., 2013).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris terhadap kinerja perusahaan, Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai topik ini. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan mekanisme *corporate governance* yang memiliki peran sentral untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu sepengetahuan penulis, belum ada penelitian di Indonesia yang berfokus dan meneliti pengaruh jumlah komisaris terhadap hubungan kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Data yang digunakan adalah data perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012 hingga 2015.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
- 2. Apakah jumlah komisaris memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Menguji dan menganalisis kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Menguji dan menganalisis jumlah komisaris memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan

2.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijabarkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bukti empiris dan referensi guna melakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh jumlah komisaris dalam hubungan kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan di Indonesia.

Manfaat Praktis

- Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan guna memilih perusahaan berkinerja baik ditinjau dari keefektifan kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris.
- Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan untuk meninjau keefektifan adanya kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris terhadap kinerja perusahaan.

2.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik untuk akademisi maupun praktisi dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, hipotesisi dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan deskripsi obyek penelitian, seluruh proses dan teknik analisis data hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari hipotesisi penelitian dan pengajuan saran agar dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.